

**PERSEPSI PENCITRAAN POLITIK PADA KABINET
INDONESIA BERSATU II DITINJAU DAEI JENIS
PEKERJAAN**

Naskah Publikasi

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1)**



Disusun Oleh :

ADI DIBYO WIBOWO

F 100 040 039

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

**PERSEPSI PENCITRAAN POLITIK PADA KABINET INDONESIA
BERSATU II DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN**

Yang diajukan oleh:

Adi Dibyo Wibowo
F 100040039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

25 Juli 2012

dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Penguji Utama

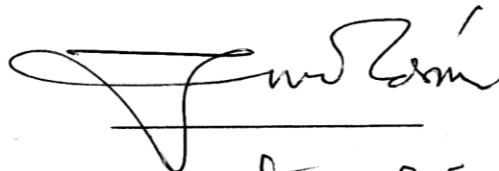

Drs. Soleh Amini, M.Si

Penguji Pendamping I

Drs. Mohammad Amir, M.Si

Penguji Pendamping II

Drs. Daliman SU



Surakarta, 25 Juli 2012

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Psikologi

Dekan



Susanto Wibowo, S.Psi, M.Si



PERSEPSI PENCITRAAN POLITIK PADA KINERJA KABINET INDONESIA BERSATU II DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN

Adi Dibyo Wibowo

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Abstrak

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke ke dalam otak manusia. Citra adalah kecenderungan yang tersusun dari pikiran dan kesudian, citra selalu berubah seiring dengan berubahnya pengalaman. Persepsi pencitraan dapat terlihat dari pendapat ataupun pola pikir pada saat mempersepsikan suatu realitas yang terjadi, dengan begitu satu hal yang perlu dipahami dan diperhatikan kaitannya dengan pembentukan citra adalah persepsi terhadap realitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi pencitraan politik pada kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II ditinjau dari jenis pekerjaan. Pada penelitian ini, jenis pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu PNS dan buruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan skala sebagai alat ukur persepsi dan analisis data menggunakan korelasi *product moment* dan uji Anava satu jalur. Partisipan penelitian ini adalah PNS Diknaspora Surakarta dan buruh PP Jerapah Mojosongso Surakarta berjumlah 86 orang. Hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi PNS dan Buruh mengenai pencitraan politik

Kata kunci: Persepsi, pencitraan politik, jenis pekerjaan.



PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 termaktub cita-cita pokok dari Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan dunia dan keadilan sosial, cita-cita luhur ini harusnya bukan merupakan harapan belaka yang entah kapan direalisasikan, lebih dari itu, cita-cita bangsa ini perlu realisasi yang aktual dengan kondisi global saat ini. Sebagai sebuah dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 tentu harus dijadikan pegangan oleh setiap bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya, lebih jauh lagi bagi seorang pemimpin negeri, Undang-Undang Dasar ini haruslah menjadi sebuah patokan bagi setiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya, dan pada tahap akhir cita-cita dasar bangsa ini, harusnya menjadi hal yang menjadi

tujuan utama dari pemimpin negeri ini, siappun orangnya, apapun latar belakangnya dari manapun ia berasal.

Indonesia negara demokratis pertama terbesar di ASEAN (World Audit Organization) dengan jumlah penduduk hampir 235 juta dan jumlah angkatan kerja produktif sebesar 118,83 juta orang, adalah Negara yang diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi dunia bersama Cina, Rusia, India dan Brasil (Nusantaraku, 2008). Secara makro ekonomi, Indonesia berada pada posisi yang positif dan stabil ditambah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor riil (Hirawan, Vol 39 No 3) dan PDB Indonesia diprediksi akan mencapai Rp 14,379 triliun pada tahun 2025.

Pertumbuhan makro ekonomi yang pesat rupanya belum mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Bank dunia mencatat orang miskin di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 18,9 juta orang. Angka 18,9 juta didapat dengan indikator kemiskinan 1,5 dollar atau Rp 12.000,- perhari (worldbank.org). Data lain Bank dunia juga



menyebutkan bahwa 50,6 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan standar kemiskinan 2 dollar atau Rp. 16.000,- perhari. Asian Development Bank (ADB) mencatat orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang dalam 3 tahun terakhir, dan merupakan tertinggi se-Asia Tenggara (Asteng). Pada tahun 2008, ADB mengatakan angka kemiskinan Indonesia mencapai 40,4 juta, dan di tahun 2010 naik menjadi 43,1 juta jiwa (AKATIGA, 2011)

Presiden SBY menyatakan ada 10 hal utama yang dicapai pemerintahannya selama setahun. Pertama, ekonomi terus berkembang dengan fundamental yang makin kuat. APBN, cadangan devisa, IHSG, investasi, ekspor, daya saing Indonesia di dunia global 10 kali lebih bagus. Kedua, indikator kesejahteraan yang mengalami kemajuan, baik di bidang pendidikan dan kesehatan. Ketiga, stabilitas politik juga terjaga, demokratisasi berkembang, meskipun sesekali terdapat riak dan benturan. Secara nasional stabil, cek dan balance dengan DPR, DPD makin baik,

pemilu daerah lancar walau ada protes itu wajar dalam demokrasi. Keempat, soal penegakan hukum walau dalam beberapa kasus ada kekuarangan tapi untuk pemberantasan korupsi, terorisme, pemberantasan narkoba mencatatkan beberapa prestasi. Kelima, ada perselisihan komunal, tapi keamanan dalam negeri berjalan baik. Keenam, hambatan birokrasi berkurang sehingga perbaikan iklim investasi mengalami kemajuan. Ketujuh, kemiskinan dan pengangguran menurun meskipun rawan karena gejolak perekonomian dunia. Kedelapan, beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatatkan rekor baru dalam sejarah, seperti *income* perkapita, cadangan devisa naik, IHSG dan PDB Indonesia di peringkat 16 ekonomi dunia. Kesembilan, upaya pengembangan koperasi/UMKM termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) berjalan dengan baik di seluruh daerah. Kesepuluh, Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, baik mengatasi krisis global, pemeliharaan perdamaian dunia dan



kerjasama mengatasi perubahan iklim (kompas.com).

Hal terpenting bagi masyarakat seluruh pelayanan publik yang diurus oleh pemerintahan SBY bisa memberikan layanan maksimal. Harga-harga bisa terkendali dengan baik, sesuai dengan daya beli masyarakat. Terwujudnya *salus populi suprema lex*, dimana kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai hukum tertinggi. Sekalipun pemerintah melawan arus untuk itu dengan mengorbankan popularitas, tetapi itu lebih bermartabat, karena disitulah hakikat demokrasi yang sesungguhnya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan menjadikan *das sollen* dekat dengan *das sein*.

Landasan Teori

Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dewasa yang sehat, dimanapun dan kapan pun mereka berada. Betapa orang akan merasa susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi

penggangur. Demikian pula banyak orang yang mengalami stres dan frustrasi dalam hidup ini karena masalah pekerjaan. Pekerjaan memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan ekonomis, sosial dan psikologis. Secara ekonomis orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Secara sosial orang yang memiliki pekerjaan akan lebih dihargai oleh masyarakat daripada yang menggangur. Secara sosial orang yang bekerja mendapat status sosial yang lebih terhormat daripada yang tidak bekerja. Lebih jauh lagi orang yang memiliki pekerjaan secara psikologis akan meningkatkan harga diri dan kompetensi diri.

Menurut Suroto (1992) Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa bagi diri atau orang lain, baik orang yang melakukan dibayar atau tidak. Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa bagi



diri sendiri atau orang lain dalam kurun waktu tertentu. Setiap kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dapat dimaknai sebagai pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat menghasilkan imbalan atau bayaran.

Menurut Siswanto Sastohadiwiryono(2003) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan personalia yang didalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (1991) ada beberapa jenis penggolongan pekerjaan yaitu:

- 1) Tenaga Profesional, teknisi dan ketatalaksanaan
Tenaga kerja ini membutuhkan keahlian dan jenjang pendidikan tertentu.
- 2) Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
Ada pendidikan khusus untuk pekerjaan ini tetapi bisa juga menjadi tenaga kerja seperti ini tanpa sekolah khusus. Contoh sekretaris, tata usaha, dan lain-lain.
- 3) Tenaga usaha penjualan
Pekerjaan ini tidak memerlukan pendidikan khusus, yang dibutuhkan hanya keramahan, komunikasi yang baik, mudah bergaul, ulet dan tekun.

Contoh penjual toko, salesman, dan lain-lain.

- 4) Tenaga usaha jasa
Usaha yang menawarkan jasa. Pekerjaan ini memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan formal/nonformal. Contoh tukang cukur dan lain-lain.
- 5) Tenaga usaha pertanian dan perikanan
Pekerjaan ini ada yang membutuhkan pendidikan khusus tapi ada juga yang hanya membutuhkan keuletan dan ketekunan. Contoh petani, peternak dan lain-lain.
- 6) Tenaga produksi, operasional, teknisi dan sejenisnya.
Tenaga ini kurang membutuhkan jenjang pendidikan tetapi memerlukan latihan. Contoh pekerja pabrik, kuli dan lain-lain.

Persepsi Pencitraan Politik

Menurut Slameto (2003), Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Menurut Leavitt (Sobur, 2003), persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah



pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu. Menurut DeVito (Sobur, 2003), persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyak stimulus yang mempengaruhi indera.

Mar`at (Syafaruddin, 1987) menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu pengetahuan, cakrawala, proses belajar (sosialisasi), dan pengalaman. Sementara menurut Jalaludin Rakhmat (1992), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan

Berdasarkan hal tersebut, di dalam penelitian ini akan mengungkap mengenai aspek-aspek persepsi yang konstruksinya diambil dari pendapat Mar`at dan Jalaludin Rakhmat di atas. Berdasarkan pendapat persepsi diatas, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan kepentingan dalam penelitian ini. Aspek- aspek persepsi tersebut dirumuskan menjadi empat aspek berikut, yaitu:

- a. Pengetahuan pekerja terhadap persepsi pencitraan politik.
- b. Proses belajar (sosialisasi) pekerja mengenai persepsi pencitraan politik.
- c. Pengalaman pekerja tentang persepsi pencitraan politik.
- d. Cakrawala berfikir pekerja mengenai persepsi pencitraan politik.

Jalaludin Rakhmat (1992) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

- a) Faktor fungsional, yang terdiri dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, motivasi, harapan dan keinginan, perhatian, emosi, dan suasana hati serta hal-hal lain yang termasuk dalam faktor personal
- b) Faktor struktural, terdiri dari intensitas stimulus, ukuran stimulus, perubahan stimulus, ulangan dari stimulus dan pertentangan atau kontra dari stimulus.
- c) Faktor kebudayaan atau kultur, dimana individu tumbuh dan berkembang dan turut menentukan persepsi seseorang

Penciptaan opini publik dalam dunia politik pencitraan



mengarah pada narasi yang dikonstruksikan sedemikian rupa dengan bahasa, tidak sekedar untuk melukiskan suatu fenomena atau lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi cara melihat lingkungan sekitar. Implikasinya, bahasa juga dapat digunakan untuk memberikan akses tertentu terhadap suatu peristiwa atau tindakan, misalnya dengan menekankan, mempertajam, memperlambat, mengagungkan, melecehkan, membelokkan atau megaburkan peristiwa atau tindakan tersebut.

Politik pencitraan mengarah pada kontinuitas antara citra politik dan realitas politik, sehingga teknologi pencitraan mengkonstruksi semacam realitas kedua (*second reality*) yang didalamnya kebenaran dimanipulasi. Sebuah strategi penyamaran tanda dan citra. Citra politik menjelma menjadi kekuatan utama dalam mengendalikan wacana politik sehingga di dalamnya kini tidak hanya terdapat kekuatan pengetahuan, tetapi juga menjelmanya kekuatan citra

(*power/image*) sebagai kekuatan politik

Panggung politik adalah sebuah dunia yang sangat kental dengan impression management atau lebih dikenal dengan pencitraan politik seperti yang diungkapkan oleh filosof Friedrich Nietzsche bahwa palitisi adalah aktor yang menciptakan citra ideal bagi mereka sendiri. Citra adalah suatu integrasi mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan orang itu, dipersepsi dan diinterpretasikan rakyat menurut kepercayaan, nilai dan pengharapan mereka. Tetapi kebanyakan politisi mendapat kesulitan besar untuk bisa dikenal dan mempunyai citra (Nimmo, 2001) seperti yang dikemukakan oleh Jost dan Sidanius (2004) *Personality and politics focus on understanding the behavior of individual political actors, especially professional politicians and the other elite decision-makers*

Hipotesis

1. Ada perbedaan persepsi pencitraan politik pada kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II



ditinjau dari jenis pekerjaan antara PNS dan buruh.

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian

1. Variabel Tergantung :
Jenis Pekerjaan : - PNS
-Buruh
2. Variabel bebas :
Persepsi

Subjek

Populasi penelitian ini adalah PNS Diknaspura Surakarta dari buruh PP Jerapah Mojosongo Surakarta berjumlah total 86 orang, terdiri dari 43 PNS dan 43 buruh.

Alat ukur

Alat ukur yang digunakan sebagai pengumpul data adalah skala persepsi yang disusun sendiri oleh peneliti. Skala persepsi berdasarkan aspek-aspek aspek-aspek persepsi yang dikonstruksi diambil dari pendapat Mar`at (Syafaruddin, 1987) dan Jallaludin rakhmat (1992). Aspek-aspek tersebut yaitu pengetahuan, proses belajar (sosialisasi), pengalaman dan cakrawala berfikir.

Analisis data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan korelasi *product moment* dan uji Anava satu Jalur menggunakan SPS-2005 (Seri Program Statistik-2005) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, IBM/IN, UGM, Yogyakarta, Indonesia, hak cipta (c) 2005, dilindungi UU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan reliabilitas

Uji coba alat ukur dalam penelitian ini menggunakan *try out* terpisah. Hasil uji validitas skala persepsi diperoleh 58 aitem yang shahih dari 80 butir aitem yang diuji cobakan, yang gugur 12 aitem, dengan koefisien validitas dari – 0,010 sampai 0,688 dengan $p < 0,05$ dan koefisien reliabilitas (r_{tt}) = 0,952

Uji Asumsi

Hasil uji normalitas sebaran dari variabel persepsi menunjukkan Kai Kuadrat sebesar 4,438; $p = 0.0880$ atau $p > 0,05$ berarti sebarannya normal

Hasil uji homogenitas pada variabel persepsi sebesar 1,021 dengan nilai $p = 0,457$. Berdasarkan



hasil tersebut, maka menunjukkan variansi yang homogen karena nilai $p > 0,05$

Uji hipotesis

Hasil uji hipotesis perbedaan persepsi pada PNS dan buruh di peroleh hasil uji t antar A sebesar -1,200 dengan nilai $p = 0,231$ ($p > 0,05$). hasil tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi pencitraan politik antara PNS dan Buruh.

Hasil Rerata persepsi pada PNS sebesar 195,023 dan buruh sebesar 201,953 dengan nilai rerata hipotetik sebesar 145. Maka tingkat persepsi subjek pada penelitian ini tergolong tinggi.

Pembahasan

Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada persepsi pencitraan politik pada PNS dan buruh hal ini ditunjukkan oleh nilai t pada variabel persepsi sebesar 1,200 dengan signifikansi 0,231 ($p > 0,05$) dan kedua kelompok memiliki tingkat persepsi yang sama yaitu kategori tinggi dengan nilai rerata empirik PNS 195,023 dan buruh

201,953. Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh SE ILO 2011

Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada persepsi pencitraan politik ditinjau dari jenis pekerjaan yaitu PNS dan buruh sesuai apa yang diungkapkan oleh Winter (2004) *several different kinds of factors that may account for the personal appeal and greatness of political leaders are leader characteristics independent of the situation, leader characteristics that match systematically changing situational demands and leader characteristics that match characteristics of followers or the population in general, whatever the determinants of these latter characteristics may be.*

Dalam penelitian yang dilakukan (LAP SE ILO FINAL IND,2011) survey memperlihatkan bahwa responden menganggap Pemerintah sudah menerapkan dengan baik kebebasan berserikat dan persamaan gender dalam kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kesempatan kerja dan upah layak. Definisi upah layak berdasarkan penelitian AKATIGA



adalah upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standart (40 jam) yang sudah memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung (Tjandraningsih & Herawati, 2009).

Adapun kelemahan penelitian ini adalah subjeknya kurang banyak dan generalisasi dari hasil penelitian ini terbatas pada populasi dimana penelitian dilakukan dengan karakteristik jenis kelamin laki-laki dan perempuan, peneliti tidak bertemu secara langsung kepada subjek sehingga peneliti tidak mengetahui secara langsung pengisian angket oleh subjek dan alat ukur yang dipakai hanya menggunakan metode skala sehingga aspek-aspek psikologi pada subjek penelitian belum dapat terungkap secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang tidak signifikan yang berarti pula tidak ada perbedaan yang signifikan pada persepsi pencitraan politik ditinjau dari jenis pekerjaan hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t Antar

A pada variabel persepsi yaitu sebesar sebesar -1,200 dengan nilai $p = 0,231$ ($p > 0,05$). PNS dan buruh sama-sama memiliki persepsi pencitraan politik yang tinggi terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II

SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan beberapa saran kepada pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi ilmuwan psikologi

Diharapkan dapat menindalanjuti hasil penelitian dengan cara mengadakan kajian teoritis yang lebih mendalam tentang psikologi sosial politik sehingga akan bermanfaat secara lebih luas lagi

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti yang selanjutnya yang memiliki keinginan melanjutkan ataupun melakukan penelitian yang serupa, dapat melakukan penelitian dengan menambah karakteristik subjek seperti usia dan tingkat pendidikan. Peneliti selanjutnya juga



diharapkan dapat memperluas populasi dan sampel untuk penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Bisniskeluarga.kompas.com/read/2011/01/03/2051851/Pemerintah.Berhasil.Turun
kan.Angka.Kemiskinan.

Direktori Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia, AKATIGA 2011

Hani Handoko, T. 1991. *Managemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*.
Yogyakarta: BPFE UII.

Hirawan. Fajar B, Tinjauan Perkembangan Ekonomi Pertumbuhan Positif
Dibayangi Kenaikan Harga, Jurnal Analisis CSIS, Vol 39, No. 3

Jost, John & Sidanius, Jim. *Political Psychology: Personality and Politic*. New
York and Hove: Psychology Press.

LAPORAN_SE_ILO_FINAL IND: *Laporan Persepsi Pekerja Terhadap Faktor-
Faktor Pendukung Keberlangsungan Usaha di Indonesia*. 2011

Nimmo, DAN, 2001: *Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rakhmat, Jallaudin, 1992. *Psikologi Komunikasi*. Edisi revisi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.

Sastrohadiwirya, S. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan
Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*.
Yogyakarta: UGM Press

Slameto, 2003. *Belajar dan faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka
Cipta.

Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia.



Tjandraningsih & Herawati. 2009. *Menuju Upah Layak-Survei upah buruh tekstil dan garmen di Indonesia.*

Winter, David G. 2004. *Leader Appeal, Leader Performance, and the Motive Profiles of Leaders and Followers: A Study of American Presidents and Elections*: Wesleyan University

World Audit Organization, <http://www.worldaudit.org/democracy.htm>

World Bank, 2005, Raising Investment in Indonesia: A Second Generation Of Reforms, Report NO. 3 1708-ID.Tersedia di http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2005/05/17/000011823_20050517122403/Rendered/PDF/31708.pdf